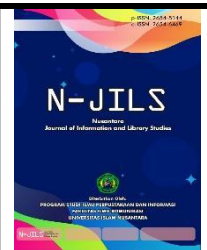




**N-JILS**  
Nusantara  
Journal of Information and Library Studies

Journal homepage: [ojs.uninus.ac.id/index.php/JILS](https://ojs.uninus.ac.id/index.php/JILS)



## **IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DALAM DIPLOMASI MILITER TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN STRATEGIS**

### ***IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEMS IN MILITARY DIPLOMACY TOWARDS STRATEGIC DECISION MAKING***

**Arief Hidayat <sup>\*1</sup>, Yotanabey A.M <sup>2</sup>, Ahmad G. Dohamid <sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Universitas Pertahanan

e-mail: <mailto:nindiarief98@gmail.com>

---

#### **ARTICLE INFO**

##### *Article history*

Received [April, 2024]

Revised [May, 2024]

Accepted [Juni, 2024]

Available Online [Juni, 2024]

---

#### **ABSTRACT**

*Ten-Dash Line represents China's unilateral territorial claim over the South China Sea. Indonesia is firmly defending its sovereignty while prioritizing peaceful diplomatic efforts to resolve the conflict in the Natuna Sea. Diplomacy employs military diplomacy or defense diplomacy. The success of a country's defense diplomacy strategy is the collaboration of diplomacy, defense, and development components integrated within an information system. In the complex and sensitive context of the South China Sea conflict, decision-making requires accurate, timely, and up-to-date information to formulate effective policies. The research method used was a qualitative case study approach. Data were obtained through interviews and literature review. The results illustrate that the*

---

*role of information systems is increasingly crucial in supporting the implementation of effective military diplomacy. Meanwhile, information systems as a support for military diplomacy are not yet optimal because each data center and information center within the Ministry of Defense and within the Indonesian National Armed Forces (TNI) are not fully integrated. Hedging methods are decided based on in-depth analysis obtained from information systems. However, without interoperability, considerable time and resources are spent addressing system differences, thereby reducing the overall effectiveness and efficiency of implementing military diplomacy strategies. To achieve the full potential of information systems, ongoing investment in technology development, personnel training, and increased inter-agency collaboration is required.*

**Keywords:** *Military Diplomacy, Ten Dash Line, Role of Information Systems, South China Sea Conflict, Strategic Decision Making*

---



---

*Kata kunci: Diplomasi Militer, Konflik Laut China Selatan, Ten Dash Line, Pengambilan Keputusan Strategis, Peran Sistem Informasi.*

---

#### **ABSTRAK**

*Ten dash line merupakan klaim teritorial sepihak Tiongkok atas wilayah perairan Laut China Selatan. Indonesia bersikap tegas mempertahankan kedaulatan sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik secara damai dalam menangani konflik di Perairan Natuna. Diplomasi menggunakan diplomasi militer atau diplomasi pertahanan. Keberhasilan strategi diplomasi pertahanan suatu negara merupakan kolaborasi dari komponen diplomasi, pertahanan, dan pembangunan yang terintegrasi dalam suatu sistem informasi. Dalam konteks konflik di Laut China Selatan yang kompleks dan sensitif, pengambilan keputusan dalam situasi tersebut memerlukan informasi yang akurat, cepat, dan terkini untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peran sistem informasi*

---

---

semakin krusial dalam mendukung pelaksanaan diplomasi militer yang efektif. Sedangkan sistem informasi sebagai pendukung diplomasi militer belum optimal dikarenakan setiap pusat data dan pusat informasi di Kementerian Pertahanan dan di lingkungan TNI belum terintegrasikan sepenuhnya. Cara hedging diputuskan berdasarkan analisa mendalam yang diperoleh dari sistem informasi. Tetapi, tanpa interoperabilitas, banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengatasi perbedaan sistem, sehingga menurunkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan dalam pelaksanaan strategi diplomasi militer. Guna mencapai potensi penuh dari sistem informasi, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, pelatihan personel, dan peningkatan kerjasama antar lembaga.

---

© 2019 NJILS. All rights reserved.

---

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan menyebutkan, Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain.

Ancaman militer terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) cukup intensif terjadi di Laut China Selatan. Ancaman terhadap kedaulatan NKRI di Laut China Selatan tidak selalu secara langsung melibatkan militer suatu negara. Ancaman kedaulatan sering kali terjadi melalui pencurian ikan oleh kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Menjadi ancaman militer ketika kapal-kapal asing penangkap ikan yang memasuki ZEE Indonesia tersebut dikawal kapal coast guard atau kapal perang.

Laut China Selatan memiliki luas sekira 3,5 juta kilometer persegi terletak di wilayah perairan Asia Timur dan Asia Tenggara. Laut China Selatan menyentuh garis pantai negara-negara

seperti China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Indonesia, Taiwan. Laut China Selatan merupakan jalur yang bernilai strategis sebagai Sea Lines of Trade (SLOT) dan Sea Line of Communications (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Laut China Selatan merupakan jalur perdagangan maritim yang sangat penting bagi perekonomian global, dengan sekitar 30% perdagangan dunia melewati wilayah tersebut setiap tahunnya. Di samping itu, Laut China Selatan memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti ikan, minyak bumi, gas alam, dan potensi tambang mineral lainnya.

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis dan kaya akan sumber daya alam sehingga menjadi wilayah sengketa dan konflik. Konflik di Laut China Selatan sudah berlangsung lama dan belum menemukan solusi damai meskipun ASEAN dan Tiongkok melakukan berbagai upaya Menurut (Lisbet, 2023: 8-9). Upaya damai yang sudah dilakukan antara ASEAN dengan Tiongkok di antaranya adalah Declaration on Conduct (DOC) of the Parties in the South China Sea pada 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. DOC tersebut berisi komitmen China dan negara-negara ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi. Upaya damai berikutnya adalah ASEAN dan Tiongkok menyepakati Guidelines for the Implementation of the DOC, pada tahun 2011, di Bali. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya pembahasan awal mengenai pembentukan Regional Code of Conduct in the South China Sea (CoC) di Laut China Selatan. Fungsi kesepakatan ini adalah untuk menghadirkan seperangkat mekanisme peraturan tata perilaku untuk negara-negara yang berkepentingan di Laut China Selatan.

Tetapi, Tiongkok meningkatkan kekuatan Angkatan lautnya guna memperkuat klaim atas Laut China Selatan, melalui konsep ten dash line (Triwahyuni, 2010: 41). Jalur ten dash line membentang sejauh 2.000 km dari daratan Tiongkok hingga memasuki wilayah perairan Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei Darusalam, Indonesia.

Sedangkan wilayah ZEE Indonesia, dan anggota ASEAN lainnya, ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. UNCLOS 1982, berisi penetapan batas-batas ZEE dari setiap negara yang kaitannya dengan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai dengan hukum laut internasional.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik secara damai

dalam menangani konflik di Perairan Natuna. Secara resmi, pemerintah Indonesia, menyatakan: pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982, oleh karena itu, merupakan kewajiban Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui ten dash line atau klaim sepihak yang dilakukan Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang tidak diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. (Setkab, 2020).

Dinamika keamanan di kawasan khususnya Laut China Selatan, berpengaruh sangat besar terhadap pertahanan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengkomunikasikan kepentingan pertahanan tersebut kepada negara-negara di kawasan. Komunikasi berperan penting menghindarkan terjadinya misinterpretasi dari negara-negara di kawasan terhadap kebijakan pertahanan di kawasan yang berpotensi membawa instabilitas keamanan di kawasan (Prihartono, 2022: 5885).

Pemerintah Indonesia memprioritaskan usaha diplomatik secara damai dalam memelihara keamanan dan menangani konflik, melalui dialog-dialog konstruktif baik dengan negara-negara ASEAN maupun negara lain di luar kawasan. Diplomasi terkait pertahanan dan keamanan nasional adalah menggunakan diplomasi militer atau diplomasi pertahanan.

Diplomasi pertahanan merupakan seluruh cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan, dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan (Pedrason, 2015: 15). Diplomasi pertahanan digunakan sebagai alat untuk mencapai target kebijakan luar negeri, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu keamanan negara.

Terdapat beberapa kasus misi diplomasi pertahanan atau diplomasi militer terkesan berjalan sendiri-sendiri. Faktor penyebabnya di antaranya adalah: dalam penyusunan mission paper baik oleh Kementerian Luar Negeri maupun TNI belum dilaksanakan secara terkoordinasi. Mission paper merupakan panduan pelaksanaan diplomasi di suatu negara yang berisi prioritas sasaran serta strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan diplomasi. Penyusunan mission paper untuk kepala perwakilan masih dilakukan oleh calon duta besar dan belum dilakukan oleh

Kementerian Luar Negeri sehingga mission paper tersebut tidak tercapai. Namun, yang lebih disayangkan lagi, Atase Pertahanan RI sebagian besar, jika tidak seluruhnya, tidak memiliki mission paper sebagai panduan pelaksanaan tugas diplomasinya. (Sudarsono, dkk, 2018: 93-94).

Negara-negara di dunia, termasuk negara-negara di Kawasan Laut China Selatan menggunakan sistem informasi. Tiongkok membangun Strategic Support (SS) pada tahun 2016 dengan menyentralisasi misi-misi perang angkasa, cyber, elektronik, dan psikologis dalam satu angkatan. Pemerintah Tiongkok percaya bahwa mencapai dominasi informasi dalam spektrum elektromagnetik dan menghalang penggunaannya oleh musuh menjadi kebutuhan untuk tetap unggul secara strategis dalam konflik (Djelantik, 2021). Sedangkan Amerika Serikat (AS) yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan, pada akhir tahun 2023, membangun Combined Joint-All Domain Command and Control (CJADC2) yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai sensor, penembak, aliran data Angkatan bersenjata AS dan mitra internasionalnya, di bawah jaringan yang lebih terpadu agar pengambilan keputusan lebih baik dan lebih cepat.

Salah satu militer negara ASEAN yaitu Angkatan Bersenjata Singapura (SAF/Singapore Armed Forces), membentuk the Digital and Intelligence Service (DIS). DIS akan meningkatkan, melatih, dan mempertahankan kekuatan dan kemampuan digital untuk memenuhi misi mereka dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan Singapura dari ancaman yang berkembang dan semakin kompleks. DIS sebagai bagian dari SAF yang terintegrasi, memungkinkan SAF untuk beroperasi lebih baik sebagai kekuatan yang berjejaring dan terintegrasi untuk menghadapi spektrum ancaman eksternal yang lebih guna meningkatkan dan menjaga perdamaian serta kedaulatan Singapura.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam konteks konflik di Laut China Selatan yang kompleks dan sensitif, pengambilan keputusan dalam situasi tersebut memerlukan informasi yang akurat, cepat, dan terkini untuk merumuskan kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi dalam diplomasi militer menjadi krusial untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan geopolitik di wilayah tersebut.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Sistem informasi tidak hanya sebatas sebagai alat untuk menyimpan data secara elektronik. Lebih dari itu, sistem informasi harus mempunyai kemampuan melakukan proses analisis yang

dibutuhkan suatu organisasi. Sistem informasi yang mempunyai kemampuan mengolah, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang baik akan menyajikan informasi yang akurat, kredibel, terkini atau mutakhir, dan mudah diakses terkait dengan kondisi suatu organisasi dan lingkungannya. Laporan yang tersaji cepat dan dapat diakses kapanpun membuat pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan presisi. (Idris dan Delvika, 2014)

Dalam konteks militer, sistem informasi berperan penting dalam mengordinasikan dan mengendalikan operasi militer. Oleh karena itu, sistem informasi yang bersifat command center (pusat komando) berfungsi sebagai pengawasan dan informasi yang akurat. Command center merupakan pusat komunikasi dan pengambilan keputusan strategis karena informasi dari berbagai sumber dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk memantau dan mengendalikan situasi di lapangan, termasuk pengoperasian untuk sistem keamanan. Penerapan command center dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pemantauan dan pengendalian, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data yang dianalisis dengan baik.

Diplomasi mempunyai kekuatan yang tidak kalah hebatnya dengan armada perang. Bahkan, dibandingkan armada militer, diplomasi mempunyai kekuatan besar yang tidak menghancurkan atau memakan korban jiwa. Dan terjadinya perang dapat dicegah oleh kekuatan diplomasi. Namun, tidak demikian sebaliknya. Perang tidak akan mampu mencegah diplomasi. Oleh karena itu, diplomasi menjadi alat utama dalam hubungan internasional, sedangkan perang menjadi langkah terakhir. Tujuan utama diplomasi adalah untuk memajukan kepentingan nasional, karena itulah maka, sangat diperlukan suatu bentuk diplomasi yang mampu melibatkan semua komponen suatu negara dalam suatu sinergi, dan memandang substansi permasalahan secara integratif, atau yang biasa disebut sebagai diplomasi total, dimana isu dalam negeri dan luar negeri merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan (Surachman, 2019: 6.40).

Diplomasi dalam konteks militer melibatkan penggunaan diplomasi untuk mencapai tujuan militer negara secara efektif, baik dalam mengelola konflik, mencegah perang, atau memperoleh keuntungan strategis, sehingga membutuhkan keputusan strategik. keputusan strategik dibuat dengan memperhitungkan tujuan, sasaran, serta ruang lingkup, termasuk dengan mempertimbangkan unsur keuangan, serta frekuensi dan jangka waktu pembuatannya (Salusu, 2006: 111). Tindakan-tindakan yang berisi tujuan dan mengandung capaian-capaian yang ingin

diraih untuk dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah merupakan maksud dari kebijakan (James E. Anderson dalam Islamy, 2009: 17). Pengertian kebijakan lainnya adalah usulan-usulan yang dirumuskan dalam suatu perintah guna mengentaskan atau memecahkan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan masalah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi (Agustino, 2008: 7).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti (Noor, 2017: 32).

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini, untuk memahami obyek yang diteliti. Penelitian studi kasus bertujuan secara khusus menjelaskan dan memahami obyek yang ditelitinya secara khusus sebagai suatu 'kasus'. Berkaitan dengan hal tersebut, Yin (2018: 2) menyatakan bahwa tujuan penggunaan penelitian studi kasus adalah tidak sekedar untuk menjelaskan seperti apa obyek yang diteliti, tetapi untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi.

Indonesia memiliki Sistem Informasi Pertahanan Negara (Sisfohaneg), yaitu informasi yang dibina dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk misi diplomasi militer, tetapi dalam penyusunan mission paper terkesan berjalan sendiri-sendiri.

Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang menelaah satu kasus secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif. penelitian suatu kasus, bisa jadi melahirkan pernyataan-pernyataan yang bersifat eksplanasi. Akan tetapi, eksplanasi tersebut tidak dapat diangkat sebagai suatu generalisasi (Ardianto, 2011: 64).

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ancaman dan tantangan terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia yang muncul dari konflik di kawasan Laut China Selatan. Klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan, yang mencakup "sembilan garis putus," tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Hal ini menyebabkan insiden pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal penangkap ikan dan kapal penjaga pantai Tiongkok. Selain itu, Peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut China Selatan menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia terkait potensi eskalasi militer dan dampaknya terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut.



Gambar 1 Garis putus-putus (ten dash line) yang diklaim Tiongkok (Sumber: detiknews)



Gambar 2. Garis putus-putus (ten dash line) yang diklaim Tiongkok masuk ke wilayah ZEE Indonesia. (Sumber: sindonews.com)

Guna mengurangi ketegangan di kawasan Laut China Selatan, Indonesia perlu memperkuat diplomasi pertahanan atau diplomasi militer, dan kerja sama militer dengan negara-negara tetangga untuk menjaga stabilitas regional.

Indonesia perlu terus memainkan peran aktif dalam diplomasi regional, termasuk melalui ASEAN, untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai dan berbasis hukum internasional. Indonesia juga harus mendukung upaya untuk menyusun dan mengimplementasikan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan.

Dengan pendekatan yang komprehensif, Indonesia dapat mengelola ancaman dan tantangan dari konflik Laut China Selatan serta memastikan keamanan dan kedaulatan wilayahnya.

Isu maritim di Laut China Selatan sangat kompleks karena adanya klaim teritorial yang tumpang tindih, interpretasi atas hukum internasional yang berbeda-beda, yang melibatkan kepentingan nasional negara-negara kawasan. Dalam menyikapi dinamika di Laut China Selatan tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung pengambilan keputusan strategis, yaitu sistem informasi yang komprehensif dan akurat. Sistem informasi yang komprehensif dan akurat dimaksud harus mampu menyediakan data analisisnya yang relevan dengan aspek-aspek mengenai konflik di Laut China Selatan.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengimplementasikan sistem informasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan strategis dalam berbagai cara.

Melalui sistem informasi, data-data informasi seperti grafik, peta ataupun dashboard lebih mudah dipahami dapat divisualisasikan sehingga dapat mempermudah pimpinan melihat gambaran umum suatu permasalahan yang pada gilirannya akan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih baik. Di samping itu, melalui visualisasi tersebut, akan tergambarkan berbagai hal yang memungkinkan permasalahan yang ada dibuatkan pemodelan dalam berbagai skenario sehingga dapat mengavaluasi potensi dampak dari berbagai keputusan yang diambil nantinya, sehingga dapat membantu mengantisipasi berbagai risiko buruk atau tidak tepat. Dengan demikian, keputusan dalam menentukan strategi dapat dipilih yang paling tepat.

### **Sistem Informasi Mendukung Keputusan Strategis Terkait Konflik Laut China Selatan**

Sistem informasi yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk penyimpanan data secara elektronik saja tetapi harus mampu mendukung proses analisis yang diperlukan oleh manajemen. Sehingga dengan dukungan sistem informasi yang baik maka dapat diperoleh informasi yang akurat, terpercaya, mutakhir dan mudah diakses mengenai kondisi lingkungan. Dengan adanya laporan yang tersaji dengan cepat dan setiap saat dapat diakses tersebut maka keputusan-keputusan

yang diambil pun dapat lebih cepat dan presisi terhadap dinamika lingkungan yang ada. (Idris dan Delvika, 2014)

Sistem informasi adalah sistem yang mempersatukan komponen unik dan terpisah untuk diolah menjadi informasi. Proses pengolahan terbagi menjadi empat, yaitu proses pengumpulan, proses mengatur, proses analisis, dan proses distribusi. Komponen penting yang memiliki fungsi untuk diolah yaitu orang, teknologi, proses, dan data. Data yang diolah oleh sistem akan berubah menjadi informasi. Informasi adalah data yang memiliki nilai penting. Sistem informasi memiliki fungsi untuk menghasilkan dan menyediakan informasi penting dengan cara proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data (Satzinger, Robert, dan Stephen (2016: 4). Sedangkan informasi sendiri adalah data yang diproses menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerima dalam aktivitas pembuatan keputusan. Oleh karena itu, informasi harus berkualitas, yaitu yang memiliki karakteristik effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, Availability, compliance, dan reliability (Gelinas dan Dull, 2012: 19). Sedangkan keputusan strategis keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis (strategic decision making) adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. (Salusu, 2006: 111).

TNI sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah data menjadi informasi. Kondisi eksisting sistem terkait konflik Laut China Selatan dari sisi integrasi telah memiliki seperti infrastruktur komunikasi militer yang cukup baik, Sistem Informasi Manajemen (SIM), Geographic Information System (GIS), Sistem Pendukung Keputusan (SPK), Sistem Informasi Eksekutif (SIE), sistem surveillance, dan sistem berbasis C4ISR (Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), hingga Sistem Manajem Krisis.

Sistem informasi TNI telah memungkinkan integrasi antar-matra (Darat, Laut, Udara) dalam mendukung operasi yang melibatkan diplomasi militer, seperti latihan militer gabungan internasional dan operasi perdamaian. TNI pun mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan interoperabilitas dengan lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri dan Badan Intelijen Negara yang memungkinkan terjadi pertukaran informasi strategis yang penting untuk diplomasi militer dan kebijakan luar negeri.

Akan tetapi, semua sistem informasi tersebut secara interoperabilitas belum penuh. Hal itu dikarenakan masing-masing sistem informasi di Pusdatin Kemhan, Pusinfomar, Pusinfohata, dan Pusdalops belum terhubung satu sama lain sehingga belum dapat digunakan untuk saling bertukar data secara otomatis. Pertukaran informasi masih menggunakan intervensi operator manusia. Selain itu, masih terdapat kendala dalam akses dan pemrosesan data dari berbagai sumber serta analisis data yang lebih mendalam, termasuk analisis big data, sehingga dapat membatasi kecepatan dan ketepatan informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan.

Ketika sistem informasi milik TNI atau militer lainnya belum mencapai tingkat interoperabilitas yang optimal, terdapat beberapa dampak negatif terhadap pengambilan keputusan strategis dalam konteks diplomasi militer. Dampak yang dapat timbul adalah kesulitan dalam pertukaran informasi, keputusan yang kurang informed (terinformasi), kurangnya sinkronisasi operasional, rendahnya efisiensi dan efektivitas, tingkat keamanan yang inkonsisten, serta hambatan dalam kolaborasi internasional.

Kurangnya interoperabilitas dalam sistem informasi militer dapat merusak integritas dan ketepatan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi posisi strategis sebuah negara dalam kancah diplomasi militer internasional.

Konflik Laut China Selatan merupakan isu kompleks yang melibatkan banyak negara dan kepentingan strategis. Untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menghadapi dinamika yang cepat berubah di wilayah ini, TNI sangat bergantung pada sistem informasi yang canggih dan terintegrasi.

Sistem informasi memainkan peran yang semakin penting dalam mendukung pengambilan keputusan strategis terkait konflik Laut China Selatan. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, TNI dapat meningkatkan kemampuannya dalam memantau situasi, menganalisis data, dan membuat keputusan yang lebih baik. Namun, untuk mencapai potensi penuh dari sistem informasi, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, pelatihan personel, dan peningkatan kerjasama antar lembaga.

Dalam konteks militer, sistem informasi berperan penting dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi militer. Oleh karena itu, sistem informasi yang bersifat command center (pusat komando) berfungsi sebagai pengawasan dan informasi yang akurat. Command center

merupakan pusat komunikasi dan pengambilan keputusan strategis karena informasi dari berbagai sumber dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk memantau dan mengendalikan situasi di lapangan, termasuk pengoperasian untuk sistem keamanan. Penerapan command center dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pemantauan dan pengendalian, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan data yang dianalisis dengan baik.

Akan tetapi, sistem informasi di lingkungan TNI yang mendukung keputusan strategis terkait konflik di kawasan Laut China Selatan, belum terintegrasi secara penuh. Sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam hal integrasi sistem, keamanan siber, dan kemampuan analisis data untuk menghadapi tantangan geopolitik yang kompleks. Sejauh ini, data-data yang terangkum tersimpan dan diolah di masing-masing repositori Pusdatin Kemhan, Pusinfoha, Pusinfohar, dan Pusdalops. Semua data di masing-masing lembaga tersebut belum saling terhubung secara otomatis satu sama lain, sehingga akan menyulitkan pengambil keputusan untuk membuat skenario, perencanaan, dan strategi diplomasi militer. Bahkan sistem informasi yang ada belum terkoneksi secara otomatis dengan Puskersin sebagai Pembina Diplomasi Militer TNI.

Kondisi tersebut akan berdampak pada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti (decision making under certainty), adalah pengambilan keputusan dimana terjadi hal-hal berikut (1) Tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. (2) Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. (3) Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. (4) Pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. (5) Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. (Sinoem, 2013: 4).

Dampak paling umum yang dikaitkan orang dengan pengambilan keputusan dalam ketidakpastian adalah risiko, dan seberapa toleran seseorang terhadap skenario berisiko. Dalam situasi berbasis risiko, kita memiliki gambaran tentang kemungkinan berbagai hasil yang dapat dihasilkan oleh keputusan kita. Tentunya, pengambilan keputusan tidak boleh diambil dalam kondisi tidak pasti yang berisiko terancamnya pertahanan dan keamanan yang berkaitan langsung dengan kedaulatan negara di kawasan Laut China Selatan. Dengan demikian, untuk lebih

mendukung diplomasi militer, TNI perlu meningkatkan interoperabilitas sistem, kualitas data, dan kemampuan analisis prediktif. Selain itu, penting untuk membangun kultur organisasi yang mendukung adopsi teknologi informasi baru serta memperkuat kolaborasi antar lembaga.

### **Sistem Informasi Mendukung Pengambilan Keputusan Strategis di Tingkat Diplomasi Militer**

Organisasi-organisasi di dunia sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan organisasinya. NATO misalnya sudah menggunakan sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi dan Komunikasi NATO (NICS/NATO Information and Communication System) dan Sistem Pertukaran Intelijen NATO (NISE/NATO Intelligence Exchange System). Sistem informasi tersebut digunakan NATO untuk sarana komunikasi, pertukaran intelijen, hingga perencanaan operasi militer bersama.

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pun memanfaatkan sistem informasi yang digunakan untuk memantau situasi keamanan di seluruh dunia, mendukung operasi penjaga perdamaian, hingga memfasilitasi dialog dan negosiasi antar pihak yang terlibat dalam konflik. UNOSOM merupakan sistem informasi PBB untuk Operasi Penjaga Perdamaian, dan sistem informasi yang dinamakan UN-GLOPS yaitu Jaringan Global PBB untuk Operasi Penjaga Perdamaian.

Hal itu menggambarkan bahwa sistem informasi memiliki peran sangat penting dalam diplomasi militer yang akan membantu negara mencapai tujuan diplomatik dan pertahanan keamanan negara, membangun kepercayaan, penyelesaian konflik secara damai, dan meningkatkan keamanan global dengan cara yang lebih efektif dan efisien.

Diplomasi mempunyai kekuatan yang tidak kalah hebatnya dengan armada perang. Bahkan, dibandingkan armada militer, diplomasi mempunyai kekuatan besar yang tidak menghancurkan atau memakan korban jiwa. Dan terjadinya perang dapat dicegah oleh kekuatan diplomasi. Namun, tidak demikian sebaliknya. Perang tidak akan mampu mencegah diplomasi. Oleh karena itu, diplomasi menjadi alat utama dalam hubungan internasional, sedangkan perang menjadi langkah terakhir. (Surachman, 2019: 6.14)

Diplomasi militer fokus pada penggunaan kekuatan dari militer dalam tahap diplomasi mengenai sekumpulan isu keamanan. Diplomasi militer menjadi bagian terpenting dalam kebijakan pertahanan, keamanan dan juga kebijakan luar negeri pada suatu negara. Kondisi ini

merupakan hasil dari kepercayaan dan juga bentuk dukungan berbagai negara dalam pertemuan multilateral untuk membahas persoalan keamanan pada tingkat regional hingga internasional (Saragih, 2018).

Keterlibatan Indonesia di kawasan Laut Tiongkok Selatan merupakan tindakan nyata atas penolakan secara langsung terkait pengklaiman pemerintah Tiongkok terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu juga Indonesia mengamankan wilayah teritorialnya berdasarkan letak geografis agar tidak terjadi tindakan pengklaiman oleh negara lain secara ilegal. Dengan demikian, diplomasi militer dalam konteks konflik Laut China Selatan harus diarahkan untuk mempromosikan stabilitas, keamanan, dan penyelesaian damai sengketa di Laut China Selatan, sambil menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara-negara di wilayah tersebut.

Diplomasi militer adalah suatu instrumen kebijakan luar negeri yang melibatkan penggunaan kekuatan militer sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Dalam era digital seperti sekarang, peran sistem informasi semakin krusial dalam mendukung pelaksanaan diplomasi militer yang efektif.

Agar diplomasi militer berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi yang erat diantara pelaksana diplomasi militer. Koordinasi itu sendiri melibatkan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan focal point diplomacy, yaitu Kementerian Luar Negeri. Koordinasi tersebut mutlak perlu dilakukan karena diplomasi militer merupakan bagian dari diplomasi total suatu negara, dalam hal ini adalah Indonesia, agar tercipta suatu diplomasi yang koheren dan fokus.

Diplomasi militer tentunya akan terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, yaitu dalam konteks konflik di kawasan Laut China Selatan, dimana perairan Natuna masuk ke dalam ten dash line yang dianggap sebagai bagian dari wilayah teritorial Negara Tiongkok.

Diplomasi militer mempunyai tujuan antara lain sebagai kehadiran atau perwakilan (representation), efek daya tangkal (deterrence effect) negosiasi dan posisi tawar (bargaining position), meningkatkan kontak (increasing capability), opini publik (public opinion) serta membangun saling percaya (confidence building measure) (Supriyanto, 2014).

Keberadaan militer dalam proses diplomasi memberikan suatu daya tawar sendiri, karena dengan adanya diplomasi militer maka negara lain akan sangat memperhatikan kekuatan dan

keberadaan kita. Berkaitan dengan itu, ancaman (threat) negara Tiongkok di kawasan Laut China Selatan disikapi dengan cara hedging, yaitu tetap dekat dengan negara pengancam namun juga berusaha menyeimbangkannya. Hal itu terlihat dari hubungan bilateral antara Jakarta – Beijing tetap berlangsung dengan baik.

Tetapi di sisi lain, Indonesia menambah kekuatan militernya di perairan Natuna yang masuk ke dalam ZEE Indonesia. TNI sedikitnya menambah satu batalion untuk memperkuat pangkalan Angkatan Laut di Natuna. Angkatan Darat menambah pasukannya menjadi lebih dari 2.000 prajurit. Angkatan Udara menambah pesawat tempur untuk memperkuat patroli udara. Sedangkan Angkatan Laut mengirim 20 kapal perang ke perairan Natuna untuk berpatroli, mengawasi, dan menjaga kedaulatan. Sektor pertahanan udara mengerahkan radar di beberapa bagian pulau untuk melakukan operasi pengawasan selama 24 jam. TNI pun menggelar latihan militer di perairan Laut Natuna Utara sebagai bentuk kesiapan menghadapi perang dan bentuk diplomasi militer bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya.

Cara hedging diputuskan berdasarkan analisa mendalam yang diperoleh dari sistem informasi. Tetapi, tanpa interoperabilitas, banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengatasi perbedaan sistem, seperti mengkonversi data atau mengirim informasi melalui saluran yang tidak optimal. Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan dalam pelaksanaan strategi diplomasi militer. Hal itu terlihat dari masih adanya pencurian iklan di ZEE Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Guna mencapai potensi penuh dari sistem informasi, diperlukan investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan teknologi, pelatihan personel, dan peningkatan kerjasama antar lembaga. Karena, diplomasi militer memerlukan koordinasi optimal diantara pelaksana yang melibatkan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan focal point diplomacy, yaitu Kementerian Luar Negeri. Ancaman di kawasan Laut China Selatan disikapi dengan cara hedging, sehingga hubungan bilateral antara Jakarta – Beijing tetap berlangsung dengan baik. Cara hedging diputuskan berdasarkan analisa mendalam yang diperoleh dari sistem informasi. Tetapi, tanpa interoperabilitas, banyak waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk mengatasi perbedaan sistem, seperti mengkonversi data atau mengirim informasi melalui saluran yang tidak optimal. Kondisi tersebut dapat menurunkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan dalam pelaksanaan

strategi diplomasi militer. Hal itu terlihat dari masih adanya pencurian iklan di ZEE Indonesia oleh kapal-kapal nelayan asing. Dengan demikian, Mabes TNI harus fokus mengembangkan platform integrasi seperti middleware dan API (Antarmuka Pemrograman Aplikasi) yang mampu mengadopsi standar interoperabilitas internasional, memungkinkan sistem yang berbeda berkomunikasi, bertukar data dengan lancar, dan memiliki kemampuan analisis prediktif. Selain itu, Mabes TNI seyogyanya meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan komunikasi yang lebih kuat, pusat data yang diperbarui, dan server lebih kuat. Mabes TNI seyogyanya segera mengintegrasikan dan mengembangkan sistem informasi di command center yang memiliki kemampuan analisis prediktif, scenario planning dan membuat simulasi yang dapat memudahkan Puskersin, sebagai Pembina Diplomasi Militer TNI, dan pengambil keputusan menetapkan strategi diplomasi militer yang tepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA [Times New Roman, 12 pt Bold, space 1.5]**

- Ardianto, Elvinaro. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Ariantoko, Provid. (2024). Implementasi Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance And Reconnaissance (C4ISR) Puskodal Guskamla Koarmada I Guna Meningkatkan Keamanan Maritim di Selat Malaka. Tesis Fakultas Keamanan Nasional Program Studi Keamanan Maritim
- Djelantik, Sukawarsini. (2021). Kekuatan Nasional Tiongkok Dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Indonesian Journal of International Relations Vol.5, No. 2, pp. 292-319. DOI: 10.32787/ijir.v5i2.248
- Gelinas, U., & Dull, B. R. (2012). Accounting Information System, 9th ed. USA: Cengage Learning.
- Humas Setkab. Konflik di Perairan Natuna, Arahkan Presiden: Pemerintah Tegas Sekaligus Prioritaskan Diplomatik Damai. 5 Januari 2020, <https://setkab.go.id/konflik-di-perairan-natuna-arahan-presiden-pemerintah-tegas-sekaligus-prioritaskan-diplomatik-damai/> diunduh pada 15 Maret 2024.
- Idris, Iswandi. dan Delvika, Yuana. (2014). Analisis Perancangan Sistem Informasi Terintegrasi di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta di Medan. Jurnal Teknovasi Volume 01, Nomor 2, 2014, Hlm. 15-26
- Lisbet. (2023). Ketegangan Filipina dan China di Laut China Selatan serta Upaya ASEAN dalam Mengatasinya. Info Singkat, Vol. XV, No. 24/II/Pusaka/Desember/2023, hlm. 6-10. [https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-238.pdf](https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-24-II-P3DI-Desember-2023-238.pdf)
- Noor, Juliansyah. (2017). Metodologi Penelitian “Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Jakarta: Kencana.

- Pedrasan, Rodon. (2015). *Asean Defence Diplomacy: The Road To Southeast Asian Defence Community*. Heidelberg: University Heidelberg
- Prihartono, Didik. *Dinamika Diplomasi Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 Oktober 2022, Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Saragih, Hendra Maujana. (2018). *Strategi Indonesia dalam Menghadapi Konflik Laut China Selatan*. <http://repository.unas.ac.id/263/1/PROSIDING%20HENDRA%20SARAGIH.pdf>
- Satzinger, John; Jackson, Robert; & Burd, Stephen. (2016). *Systems Analysis and Design in A Changing World*. Massachusetts: Cengage Learning.
- Sinoem, Indrawani. (2013). *Pengambilan Keputusan Dalam Kondisi Tidak Pasti*. Modul. Universitas Gunadarma. <http://rogayah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/35768/pengambilan+keputusan+dalam+kondisi+tidak+pa+sti.pdf>.
- Sudarsono, Budyanto Putro. Mahroza, Jonni dan D.W., Surryanto. (2018). *Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, Desember 2018, Volume 8 Nomor 3, hlm. 83-102. <https://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/441>
- Supriyanto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Buku Obor.
- Surachman, Akhmad Yani. (2019). *Komunikasi Internasional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Triwahyuni, D. (2010). *Signifikansi Kawasan Asia Tenggara Dalam Kepentingan Amerika Serikat*. Majalah Ilmiah UNIKOM, 9(1), 33–44. [https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-4.pdf/pdf/volume-91-artikel-4.pdf)
- Wallace, Patricia M. (2019). *Introduction to Information Systems*, 4th edition. USA: Pearson.
- Yin, R. K. (2018). *Qualitative Research From Start to Finish*. New York. London: The Guilford Press.